

2022

LAPORAN MONEV CAPAIAN KINERJA TW III  
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PTSP  
KABUPATEN BULELENG



**DINAS PENANAMAN MODAL DAN PTSP  
KABUPATEN BULELENG**

Jalan Ngurah Rai Nomor 72 Singaraja  
Telp/Fax: (0362) 22063 Website : [dpmptsp.bulelengkab.go.id](http://dpmptsp.bulelengkab.go.id)  
Email : [domotso@bulelengkab.go.id](mailto:domotso@bulelengkab.go.id)

LAPORAN  
MONITORING DAN EVALUASI PENCAPAIAN RENCANA AKSI  
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU  
KABUPATEN BULELENG  
TAHUN ANGGARAN 2022 TRIWULAN III

Laporan Monitoring dan Evaluasi Pencapaian Rencana Aksi Kinerja Dinas Penanaman Modal dan PTSP Kabupaten Buleleng Tahun 2022 merupakan review kinerja pencapaian kinerja DPMPTSP Tahun 2022. Laporan Monitoring dan Evaluasi Pencapaian Rencana Aksi Kinerja Dinas Penanaman Modal dan PTSP Kabupaten Buleleng Tahun 2022 mempunyai beberapa fungsi, antara lain merupakan alat penilaian ketepatan target atau rencana aksi kinerja tahunan terhadap pencapaian yang dipantau secara berkala atau triwulan dan sebagai salah satu wujud akuntabilitas pelaksanaan tugas dan fungsi DPMPTS Kabupaten Buleleng menuju terwujudnya *good governance* dan sebagai wujud transparansi serta pertanggungjawaban kepada masyarakat secara umum, selain itu juga merupakan alat kendali, pemacu, dan umpan balik peningkatan kinerja setiap unit organisasi di lingkungan DPMPTSP Kabupaten Buleleng melalui review atas target pada kinerja berikutnya.

Dengan mengucapkan terima kasih, disampaikan kepada semua pihak atas tenaga dan pikirannya sehingga laporan ini dapat disusun. Semoga laporan monitoring dan evaluasi pencapaian rencana aksi ini dapat bermanfaat untuk perbaikan pencapaian kinerja pada tahun berjalan sehingga dapat segera memberikan rekomendasi atas target yang di capai pada tahun berikutnya.

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1. Gambaran Umum**

Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Buleleng Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah dan Peraturan Bupati Buleleng Nomor 55 Tahun 2020 Tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Nomor 4 Tahun 2020 Tentang Pembentukan, Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Daerah bahwa tugas pokok DPMPTSP adalah membantu Bupati melaksanakan urusan pemerintahan di Bidang Penanaman Modal dan Pelayanan Administrasi Perizinan. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu mempunyai fungsi:

1. perumusan kebijakan di bidang Penanaman Modal dan Pelayanan Administrasi Perijinan;
2. pelaksanaan kebijakan di bidang Penanaman Modal dan Pelayanan Administrasi Perijinan;
3. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang Penanaman Modal dan Pelayanan Administrasi Perijinan;
4. pelaksanaan administrasi dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu;
5. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati.

Jumlah izin yang ditangani DPMPTSP Kabupaten Buleleng sesuai Peraturan Bupati Buleleng Nomor 21 Tahun 2022 tentang Pendelegasian Wewenang Penyelenggaraan Berusaha di Daerah dan Non Perizinan Dari Bupati Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (Berita Daerah 2022 Nomor 21) adalah 113 (seratus tiga belas) jenis perizinan dan sejumlah 52 (lima puluh dua) non perizinan yang dikelola

### **1.2. Rencana Strategis**

Berdasarkan kondisi umum daerah Kabupaten Buleleng saat ini, permasalahan, tantangan dan isu-isu strategis yang dihadapi di masa depan, serta dengan memperhitungkan faktor strategis, potensi Sumber Daya Alam (SDA) dan Sumber Daya Manusia (SDM), pemangku kepentingan, serta Pemerintah Daerah, maka dalam pelaksanaan pemerintahan dan pembangunan untuk periode 2017-2022 dicanangkan Visi Pembangunan Kabupaten Buleleng yaitu **“Terwujudnya Masyarakat Buleleng yang Mandiri, Sejahtera, dan Berdaya Saing Berlandaskan Tri Hita Karana”**.

Misi merupakan rumusan umum mengenai upaya-upaya yang akan dilaksanakan untuk mewujudkan visi. Misi berfungsi sebagai pemersatu gerak, langkah dan tindakan nyata bagi

segenap komponen penyelenggara pemerintahan tanpa mengabaikan mandat yang diberikannya. Adapun misi pembangunan Kabupaten Buleleng untuk 5 (lima) tahun kedepan adalah sebagai berikut:

1. Memantapkan Pembangunan Ekonomi untuk Mewujudkan Pertumbuhan Ekonomi yang Inklusif;
2. Pengembangan Ekonomi Kerakyatan yang Berbasis pada Produk Unggulan Daerah;
3. Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia yang Profesional, Berbudaya dan Berintegritas;
4. Memantapkan Partisipasi Pemangku Kepentingan Dalam Pembangunan;
5. Meningkatkan Kuantitas dan Kualitas Infrastruktur Daerah untuk Pemenuhan Pelayanan Publik;
6. Mewujudkan Pembangunan Buleleng yang Berbudaya dan Berkelanjutan (*Sustainable Development*).

Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Buleleng mendukung terwujudnya visi maka melaksanakan misi yang ke-1 yaitu “*Memantapkan Pembangunan Ekonomi untuk Mewujudkan Pertumbuhan Ekonomi yang Inklusif*” dan tujuan “*Pembangunan Ekonomi yang Inklusif*” dan sasaran “*Meningkatnya pertumbuhan ekonomi didorong oleh munculnya pusat-pusat pertumbuhan ekonomi kawasan*”.

Tujuan penyelenggaraan pembangunan bidang Penanaman Modal yang dilaksanakan oleh Dinas Penanaman Modal dan PTSP Kabupaten Buleleng dalam rangka pencapaian tujuan RPJMD yaitu: “*pertumbuhan ekonomi yang inklusif* “ melalui tujuan yaitu “Meningkatnya nilai investasi”.

Adapun sasaran yang ingin dicapai oleh Dinas Penanaman Modal dan PTSP Kabupaten Buleleng adalah “*meningkatnya pertumbuhan ekonomi didorong oleh munculnya pusat-pusat pertumbuhan ekonomi kawasan*” melalui:

- a. Meningkatnya kerjasama di bidang investasi
- b. Meningkatnya nilai investasi dan realisasi investasi
- c. Meningkatnya kualitas pengelolaan pengaduan
- d. Meningkatnya kualitas pelayanan perizinan A
- e. Meningkatnya kualitas pelayanan perizinan B
- f. Meningkatnya kualitas pelayanan administrasi perkantoran
- g. Meningkatnya akuntabilitas kinerja SKPD

Untuk dapat melihat keterkaitan antara visi, misi, tujuan dan sasaran serta rumusan strategi dan kebijakan yang diselaraskan dengan Program yang menjadi Urusan Penanaman Modal pada RPJMD Kabupaten Buleleng Tahun 2017-2022 dapat dilihat pada Tabel berikut :

**Tabel 1.**  
**Tujuan, Sasaran, Strategi dan Kebijakan**

VISI	<b>Terwujudnya Masyarakat Buleleng yang Mandiri, Sejahtera, dan Berdaya Saing Berlandaskan Tri Hita Karana</b>		
MISI I	<b>Memantapkan Pembangunan Ekonomi untuk Mewujudkan Pertumbuhan Ekonomi yang Inklusif</b>		
Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
1. Meningkatkan Nilai Investasi	1.1 Meningkatkan kerjasama di bidang investasi	1.1 Memberikan pedoman dan gambaran kepada investor untuk memilih jenis dan program investasi yang sesuai dengan keinginannya;	1. Menginventaris dan menyusun <i>feasibility study</i> terhadap potensi-potensi investasi;  2. Merumuskan sistem promosi investasi dan sistem kerjasama investasi baik dalam skala Nasional, Regional maupun Internasional;
	1.2 Meningkatkan nilai investasi dan realisasi investasi	1.2 Memberikan kemudahan kepada investor dalam mendapatkan berbagai informasi di bidang Penanaman Modal dan Perijinan;	1. Merumuskan dan meningkatkan sistem koordinasi dengan dinas/badan/kantor/bagian dan kelembagaan lainnya;  2. Merumuskan pembangunan dan pengembangan Sistem Informasi Penanaman Modal dan Perijinan  3. Merumuskan sistem pembinaan dan pengendalian bidang penanaman modal dan perijinan
	1.3 Meningkatkan kualitas pengelolaan pengaduan	Mengoptimalkan fungsi Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP).	1. Merumuskan mekanisme pelaksanaan sistem pelayanan perijinan dan non perizinan bagi investor;
	1.4 Meningkatkan kualitas pelayanan perizinan A		
	1.5 Meningkatkan kualitas pelayanan perizinan B		
	1.6 Meningkatkan kualitas pelayanan administrasi perkantoran	1.6 Meningkatkan sarana dan prasarana penunjang kegiatan bidang penanaman modal dan perizinan dan non perizinan;	1. Menyediakan sarana prasarana aparatur yang layak fungsi
	1.7 Meningkatkan akuntabilitas kinerja SKPD	1.7 Meningkatkan pengetahuan dan kemampuan sumber daya aparatur	1. Merumuskan sistem peningkatan profesionalisme Sumber Daya Aparatur

**Tabel 2.**  
**Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah**  
**Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Buleleng**

NO	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR TUJUAN/ SASARAN	TARGET KINERJA TUJUAN/SASARAN PADA TAHUN KE-				
				1 (2018)	2 (2019)	3 (2020)	4 (2021)	5 (2022)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
1	Meningkatnya Nilai Investasi		Persentase Peningkatan Nilai Investasi	1%	1%	1%	1%	1%
		Meningkatnya kerjasama di bidang investasi	Jumlah kerjasama yang ditindaklanjuti	1 Kali	1 Kali	1 Kali	1 Kali	1 Kali
			Jumlah Investor	5 Investor	5 Investor	5 Investor	5 Investor	5 Investor
		Meningkatnya nilai investasi dan realisasi investasi	Nilai Investasi	1.248.778.389.000 Rupiah	1.261.266.173.000 Rupiah	1.273.878.834.000 Rupiah	1.286.617.623.000 Rupiah	1.299.483.799.000 Rupiah
		Meningkatnya kualitas pengelolaan pengaduan	Persentase pengaduan masyarakat yang ditindaklanjuti	100%	100%	100%	100%	100%
		Meningkatnya kualitas pelayanan perizinan A	Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap pelayanan perizinan A	80,60 Nilai	80,80 Nilai	81,00 Nilai	80,25 Nilai	81,50 Nilai
		Meningkatnya kualitas pelayanan perizinan B	Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap pelayanan perizinan B	80,60 Nilai	80,80 Nilai	81,00 Nilai	80,25 Nilai	81,50 Nilai
		Meningkatnya kualitas pelayanan administrasi perkantoran	Persentase kepuasan masyarakat dan aparatur terhadap pelayanan administrasi perkantoran dan pelayanan kantor	100%	100%	100%	100%	100%
			Persentase sarana prasarana aparatur yang layak fungsi	100%	100%	100%	100%	100%
			Persentase akuntabilitas kinerja SKPD	100%	100%	100%	100%	100%
Meningkatnya akuntabilitas kinerja SKPD	Jumlah dokumen penyelenggaraan pemerintahan yang disusun tepat waktu	4 Dokumen	4 Dokumen	4 Dokumen	4 Dokumen	4 Dokumen		

## BAB II

### LAPORAN MONITORING DAN EVALUASI PENCAPAIAN RENCANA AKSI

#### 2.1. Perjanjian Kinerja

Mengacu pada sasaran, program, indikator dan target kinerja yang telah ditetapkan sebagaimana tabel diatas, selanjutnya ditetapkan Perjanjian Kinerja. Perjanjian Kinerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Buleleng Tahun 2022 ini merupakan tindak lanjut tekad dan janji tahun 2022 dari para pejabat dan staf di Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Buleleng yang menjadi kontrak kinerja yang harus diwujudkan pada akhir tahun nanti sebagai dasar evaluasi kinerja dan penilaian.

**Tabel 3.**  
**Perjanjian Kinerja Induk Tahun 2022**

No	Sasaran Strategis (Program)	Indikator Kinerja	Target
1	Meningkatnya Nilai investasi	Nilai Realisasi Investasi	Rp 1.299.483.799.000
		Indeks Kepuasan Masyarakat	81,50 Nilai
2	Meningkatnya kualitas pelayanan publik dan akuntabilitas pelayanan publik	Prosentase akuntabilitas kinerja SKPD	100%
		Prosentase kepuasan masyarakat dan aparatur terhadap pelayanan administrasi perkantoran dan pelayanan kantor	100%

Pada tahun 2022 terdapat 5 program yang dilaksanakan, di mana pagu induk berasal dari APBD Induk. Pagu program untuk tahun 2022 adalah sebagai berikut.

**Tabel 4.**  
**Pagu Induk Tahun 2022**

No	Program	Anggaran	Keterangan
1	Program Promosi Penanaman Modal	Rp 364.716.249	APBD 2022
2	Program Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Rp 1.104.970.545	APBD 2022
3	Program Pelayanan Penanaman Modal	Rp 1.146.983.955	APBD 2022
4	Program Pengelolaan Data dan Sistem Informasi Penanaman Modal	Rp 155.141.037	APBD 2022
5	Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Rp 6.887.783.214	APBD 2022
<b>TOTAL</b>		<b>Rp 9.659.595.000</b>	

## 2.2. Pencapaian Rencana Aksi

Berdasarkan Renstra dan IKU DPMPTSP terdapat 1 sasaran strategis yaitu “Meningkatnya Nilai Investasi” dan 1 indikator kinerja yaitu “Persentase Peningkatan Nilai Investasi”. Pada tahun 2022 sesuai dengan hasil asistensi dengan bagian organisasi pada Pohon kinerja, cascading dan Perjanjian Kinerja Tahun 2022 ada perubahan pada indikator kinerja di mana terdapat 2 (dua) indikator yaitu “Nilai Realisasi Investasi” dan “Indeks Kepuasan Masyarakat”.

**Tabel 5.**  
**Capaian Rencana Kasi DPMPTSP Kabupaten Buleleng Tahun Anggaran 2022**

Sasaran Strategis Program	Indikator	Capaian Tahun Sebelumnya	Tahun 2022 (Triwulan III)			Target Akhir Renstra	Capaian Tahun 2022 terhadap target akhir Renstra
			Target	Realisasi	Capaian		
1	2	3	4	5	6	7	8
Meningkatnya Nilai Investasi	Nilai Realisasi Investasi	1.660.856.438.666	1.299.483.799.000	285.694.185.003	21,99 %	1.299.483.799.000	21,99 %
	Indeks Kepuasan Masyarakat	81,1	81,5	82,02	100,6%	81,50,	100'6%

Nilai Investasi belum memenuhi target yaitu hanya Rp.285.694.185.003,- atau 21.99 % dari nilai Investasi PMDN sebesar Rp. 190.681.400.000 dan PMA sebesar RP.95.012.785.003 belum tercapainya Nilai Investasi disebabkan adanya Sistem yang terintegritas dari pusat masih dalam proses eralihan dari OSS versi 1.1 ke Sistem OSS RBA sehingga banyak pelaku usaha yang tidak dapat mendaftar atau melaporkan usahanya ke LKPM pusat,. Pelaksanaan sosialisasi terhadap masyarakat terkait kebijakan dan pentingnya ijin untuk legalitas usaha sudah dilaksanakan dan akan dilanjutkan kTW IV . Pelaksanaan Pendampingan dan pelatihan terhadap masyarakat dalam mengakses OSS Juga sudah dilaksanakan dan menunggu sisa peserta yang belum mendapat jadwal yang ditentukan dan dilaksanakan pada akhir TW IV. Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) TW III masih sama dengan Nilai IKM pada TW II karena perhitungan IKM dilakukan pada Semester I dan II atau Triwulan II dan IV dengan nilai IKM adalah 82.02, dan berada pada kategori “BAIK” (pada nilai interval konversi: 76,61 s/d 88,30), dari 242 responden diperoleh hasil terdapat 3 unsur pelayanan yang diantaranya mendapatkan penilaian paling rendah yaitu Kualitas Sarana dan Prasana, dengan nilai 3,0575, Peringkat 8 yaitu unsur Waktu Penyelesaian dengan nilai 3.1637, dan peringkat ke-7 yaitu unsur Produk Spesifik Jenis Pelayanan dengan nilai 3,1681 namun di semua unsur pelayanan masuk dalam kategori “BAIK”, yang menggambarkan bahwa sebagian besar pengguna layanan telah merasa puas dengan penyelenggaraan pelayanan yang selama ini dijalankan, sehingga nilai IKM semester I sebesar sudah melebihi dari target yang sudah ditentukan atau sekitar 100,06%.



### 2.3. Pencapaian Program Kegiatan

Capaian Kinerja Program dan kegiatan pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Buleleng tahun 2022 Triwulan III adalah sebagai berikut.

1. Program Promosi Penanaman Modal meliputi 1 (satu) kegiatan yaitu Penyelenggaraan Promosi Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota dan 2 (dua) sub kegiatan yaitu Penyusunan Strategi Promosi Penanaman Modal dan Kegiatan Pelaksanaan Kegiatan Promosi Penanaman Modal Daerah Kabupaten/Kota. Pada triwulan III dari target 5 Investor pada tahun 2022 sudah tercapai 1 Pelaksanaan Promosi dan 2 Investor. Secara fisik sudah tercapai 75 % dan realisasi keuangan tercapai 61.84%.
2. Program Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota meliputi 1 (satu) kegiatan yaitu Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota dan 2 (dua) sub kegiatan yaitu, Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Penanaman Modal dan Koordinasi dan Sinkronisasi Pembinaan Pelaksanaan Penanaman Modal. Nilai Realisasi Investasi dari nilai Investasi PMDN sebesar Rp. 190.681.400.000 dan PMA sebesar Rp.95.012.785.003 sehingga total nilai realisasi investasi triwulan III adalah sebesar Rp. 285.694.185.003 atau sekitar 21.99 % dari total target investasi tahun 2022. Pada Triwulan III tahun 2022 realisasi investasi belum memenuhi target disebabkan adanya Sistem yang terintegritas dari pusat masih dalam proses peralihan dari OSS versi 1.1 ke Sistem OSS RBA sehingga banyak pelaku usaha yang tidak dapat mendaftar atau melaporkan usahanya ke LKPM pusat, Sedangkan untuk pelaksanaan kegiatan Secara fisik sudah tercapai 75% dan realisasi keuangan tercapai 46.01%.

Sedangkan untuk kegiatan pengawasan Berdasarkan Dokumen Pelaksanaan Anggaran tahun 2022 pada kegiatan Pengawasan yang merupakan ruang lingkup kegiatan pengendalian pelaksanaan penanaman modal yaitu kegiatan total anggaran sebesar Rp. 713.854.405, bersumber dari dana DAK Non Fisik Fasilitasi Penanaman Modal sebesar Rp. 110.913.900,- dan selain dana DAK yaitu sebesar Rp. 602.940.505,- . Untuk pengukuran kinerja kegiatan tahun 2022 dapat dilihat pada tabel 6.

Tabel 6

#### Pengukuran Kinerja Kegiatan

Triwulan III Tahun 2022

No	Uraian	Anggaran	Realisasi s.d TW II	Persentase (%)
1.	Kegiatan Pengawasan	Rp. 713.854.405	Rp. 387.603.384	54,30
2.	Out put	3 dokumen	3 dokumen	75

Berdasarkan tabel 1 untuk realisasi keuangan dari anggaran Kegiatan Pengawasan dengan anggaran sebesar Rp. 713.854.405,- realisasi sebesar Rp. 387.603.384,- atau sebesar 54,30% untuk kegiatan pengawasan yang bersumber dari Dana Alokasi Khusus Non Fisik Fasilitas Penanaman Modal realisasi sebesar Rp. 32.640.000,- atau sebesar 29,43 %.

Kegiatan pengawasan pelaku usaha dilaksanakan oleh Tim Pengawasan Pelaku Usaha Di Kabupaten Buleleng sesuai dengan Surat Keputusan Bupati Buleleng Nomor 503/225/HK/2022 tanggal 1 Maret 2022 tentang Tim Pengawasan Pelaku Usaha di Kabupaten Buleleng yang juga melibatkan SKPD terkait.

Pada triwulan III tahun 2022 dilaksanakan pengawasan terhadap pemanfaatan Air Bawah Tanah oleh para pelaku usaha dan sekaligus pengawasan akomodasi pariwisata yang memiliki Bar yang melibatkan Dinas Pekerjaan Umum dan tata Ruang Kabupaten Buleleng serta Satuan Polisi Pamong Praja, Rekapitulasi Kegiatan pengawasan pemanfaatan Air Bawah Tanah per Kecamatan dapat dilihat seperti pada tabel 7 sebagai berikut :

Tabel 7.

Data Pengawasan Pemanfaatan Air bawah Tanah

Tri Wulan III Tahun 2022

No	Kecamatan	Bulan Juli	Bulan Agustus	Bulan September
1.	Gerokgak	75		-
2.	Seririt	29	22	-
3.	Busungbiu	-		-
4.	Banjar	-	48	-
5.	Buleleng	-	50	-
6.	Sukasada	-	-	-
7.	Sawan	-	4	-
8.	Kubutambahan	-	9	-
9.	Tejakula	-	33	-
	<b>J U M L A H</b>	<b>104</b>	<b>166</b>	

Pada tabel dapat dilihat hasil pengawasan Pemanfaatan Air Bawah Tanah pada bulan Juli 2022 ndi Kecamatan Gerokgak sebanyak 75 pelaku usaha, di Kecamatan seririt pada bulan Juli sebanyak 29 pelaku usaha dan 22 pelaku usaha pada bulan Agustus 2022, jadi total pengawasan pelaku usaha di Kecamatan Seririt sebanyak 51 pelaku usaha. Pada bulan

Agustus 2022 pelaku usaha yang diawasi di Kecamatan Banjar sebanyak 48 pelaku usaha, Kecamatan Buleleng 50 Pelaku usaha, Kecamatan Sawan 4 pelaku usaha Kecamatan Kubutambahan 9 pelaku usaha dan Kecamatan Tejakula sebanyak 33 pelaku usaha jadi total pelaku usaha yang yang memanfaatkan Air Bawah tanah yang diawasi sebanyak 270 pelaku usaha.

Pada Tri Wulan III tahun 2022 juga dilaksanakan pengawasan rutin terhadap Pelaku Usaha yang bersumber dari Dana Alokasi Khusus Non Fisik tahun 2022, data pengawasan per Bidang usaha dapat dilihat pada tabel 8 sebagai berikut :

Tabel 8.

Data Pengawasan Pelaku Usaha per Bidang Usaha

Yang bersumber dari DAK NF Tahun 2022

No	Kecamatan	Bulan Juli	Bulan Agustus	Bulan September
1.	Industri	-	-	16
2.	Konstruksi	-	-	23
3.	Pariwisata	-	-	19
4.	Perdagangan	-	-	13
5.	Perikanan	-	-	23
6.	Perumahan	-	-	1
	<b>J U M L A H</b>			<b>95</b>

Pengawasan pelaku usaha yang memanfaatkan Dana Alokasi Khusus Non Fisik pada bulan September 2022 sudah kami lakukan dengan mengawasi sebanyak 95 pelaku usaha dengan berbagai rincian bidang usaha antara lain : bidang usaha industri sebanyak 16 pelaku usaha, bidang usaha konstruksi sebanyak 23 pelaku usaha, bidang usaha akomodasi pariwisata sebanyak 19 pelaku usaha, bidang usaha perdagangan sebanyak 13 pelaku usaha, bidang usaha perikanan sebanyak 23 pelaku usaha dan 1 pelaku usaha bidang perumahan.

Berdasarkan surat dari BPJS Kesehatan Kantor Cabang Singaraja nomor : 973/XI-09/0822, tanggal 4 Agustus 2022, Hal Permohonan Pemeriksaan Insidentil terkait adanya tunggakan iuran BPJS Kesehatan dari beberapa pelaku usaha, bekerjasama dengan BPJS Kesehatan Kantor cabang Singaraja dan Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Buleleng, pada tanggal 23 sampai dengan 25 Agustus 2022 melaksanakan pengawasan insidentil terhadap pelaku usaha yang masih memiliki tunggakan iuran BPJS Kesehatan, data pengawasan insidentil dimaksud dapat dilihat seperti pada tabel 4 sebagai berikut :

3. Program Pelayanan Penanaman Modal meliputi 1 (satu) kegiatan yaitu Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan Secara Terpadu Satu Pintu Dibidang Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota dan 3 (tiga) sub kegiatan yaitu Penyediaan Pelayanan Terpadu Perizinan dan Non Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik, Pemantauan Pemenuhan Komitmen Perizinan dan Non Perizinan Penanaman Modal dan Penyediaan Layanan Konsultasi dan Pengelolaan Pengaduan Masyarakat terhadap Pelayanan Terpadu Perizinan dan Non perizinan. Substansi Bagian A.I/II, total izin terbit sebanyak 1183 atau 63,09 % dari target izin sebanyak 2250 ijin. Sedangkan A.III, realisasi ijin terbit Triwulan III = 679 atau 181,07 % dari target sebanyak 375 ijin. Jadi dari target tahunan 3000 ijin untuk triwulan III mampu tercapai sebesar 1862 ijin atau sekitar 82,76 %.

Pada bidang B Ijin Terbit tahunan 3000 ijin untuk triwulan III mampu tercapai sebesar 2678 ijin atau sekitar 100,89 %.

Untuk pelaksanaan Program Kegiatan Secara fisik sudah tercapai 84.39% dan realisasi keuangan tercapai 68.43%.

Jumlah Ijin Terbit Semester III dapat Dilihat Pada Tabel 9

**Tabel 9.**  
**Rekap Jumlah Izin Terbit Triwulan II Tahun 2022**

**Rekap Jumlah Izin Terbit Triwulan III Tahun 2022**

Bidang/ Seksi	Ijin Terbit Tahun 2022												TOTAL		
	Triwulan I			Triwulan II			Triwulan III			Triwulan IV			Target	Realisasi	%
	Target	Realisasi	%	Target	Realisasi	%	Target	Realisasi	%	Target	Realisasi	%			
Bidang A															
A/I.II	625	9	1,44	1250	465	37,20	1875	1183	63,09				2500	1183	63,09
A/III	125	226	180,8	250	408	163,20	375	679	181,07				500	679	181,07
<b>Jumlah</b>	<b>750</b>	<b>235</b>	<b>31,33</b>	<b>1500</b>	<b>873</b>	<b>58,20</b>	<b>2250</b>	<b>1862</b>	<b>82,76</b>				<b>3000</b>	<b>1862</b>	<b>82,76</b>
Bidang B															
B/I.II	375	120	32,00	750	425	56,67	1125	904	80,36				1500	904	80,36
B/III	375	412	109,87	750	1272	169,60	1125	1774	157,69				1500	1774	157,69
<b>Jumlah</b>	<b>750</b>	<b>532</b>	<b>70,93</b>	<b>1500</b>	<b>1697</b>	<b>113,13</b>	<b>2250</b>	<b>2678</b>	<b>119,02</b>				<b>3000</b>	<b>2678</b>	<b>119,02</b>
<b>Total</b>	<b>1500</b>	<b>767</b>	<b>51,13</b>	<b>3000</b>	<b>2570</b>	<b>85,67</b>	<b>4500</b>	<b>4540</b>	<b>100,89</b>				<b>6000</b>	<b>4540</b>	<b>100,89</b>

4. Program Pengelolaan Data dan Sistem Informasi Penanaman Modal dan 1 (satu) kegiatan yaitu Pengelolaan Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan yang Terintegrasi pada Tingkat Daerah Kabupaten/Kota dan 1 (satu) sub kegiatan yaitu Pengolahan, Penyajian dan Pemanfaatan Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan.

Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Semester I Tahun 2022 adalah 82.02, dan berada pada kategori “BAIK” (pada nilai interval konversi: 76,61 s/d 88,30), dari 242 responden diperoleh hasil terdapat 3 unsur pelayanan yang diantaranya mendapatkan penilaian paling rendah yaitu Kualitas Sarana dan Prasarana, dengan nilai 3,0575, Peringkat 8 yaitu unsur Waktu Penyelesaian dengan nilai 3.1637, dan peringkat ke-7 yaitu unsur Produk Spesifik Jenis Pelayanan dengan nilai 3,1681 namun di semua unsur pelayanan masuk dalam kategori “BAIK”, yang menggambarkan bahwa sebagian besar pengguna layanan telah merasa puas dengan penyelenggaraan pelayanan yang selama ini dijalankan, sehingga nilai IKM semester I sebesar sudah melebihi dari target yang sudah ditentukan atau sekitar 100,06%.

Untuk Triwulan III Nilai IKM masih sama Hasilnya dengan Triwulan II

Sedangkan untuk capaian Program Kegiatan untuk fisik sudah mencapai 75% dan Capaian Keuangan mencapai 53.57%

5. Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dan 5 (lima) kegiatan yaitu Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah yang realisasi fisiknya sudah mencapai 82,13% dan realisasi keuangan mencapai 68,59 %. Terdiri dari 3 (tiga) sub kegiatan yaitu Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah, Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah di mana untuk dokumen perencanaan dari target 5 dokumen sudah terealisasi 100% yaitu RKA, RKT, Renja, Renstra dan IKU, untuk dokumen anggaran baru DPA saja, untuk laporan kinerja dan laporan pertanggungjawaban dari 4 dokumen sudah terealisasi 3 dokumen yaitu LKPJ, LKjIP dan LPPD, untuk dokumen SAKIP dari target 10 dokumen baru terealisasi 9 dokumen yaitu RAPK, PK Induk dan CRAPK Bulanan sedangkan dokumen SOP dan SP masih menunggu perbup terbaru. Kegiatan kedua adalah Administrasi Keuangan Perangkat Daerah yang realisasi fisiknya sudah mencapai 80% dan realisasi keuangan mencapai 68,52 % yang terdiri dari 5 (lima) sub kegiatan yaitu Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN, Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN, Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi keuangan SKPD, Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD dan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD di mana sudah tersusun laporan keuangan triwulan, anjab dan ABK, dokumen gaji dan tunjangan ASN untuk triwulan III. Kegiatan ketiga adalah Administrasi Umum Perangkat Daerah yang realisasi fisiknya sudah mencapai 87,11% dan realisasi keuangan mencapai 74.07% terdiri dari 6 (enam) sub kegiatan yaitu Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor, Penyediaan Bahan logistik kantor, Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan, Penyediaan Bahan bacaan dan Peraturan Perundang-undangan, Fasilitasi Kunjungan Tamu dan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD.

Kegiatan keempat yaitu Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang realisasi fisiknya sudah mencapai 84,73% dan realisasi keuangan mencapai 66.18% terdiri dari 4 (empat) sub kegiatan yaitu Penyediaan Jasa Surat Menyurat dari target 1.500 surat pada triwulan III tercapai 1.500 surat, Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber daya Air dan Listrik, Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor, dan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor. Kegiatan Kelima adalah Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang realisasi fisiknya sudah mencapai 73,81% dan realisasi keuangan mencapai 67% terdiri dari 3 (tiga) sub kegiatan yaitu Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan, Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya dan Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor dan Bangunan Lain.

### BAB III EVALUASI CAPAIAN RENCANA AKSI

Untuk dapat melihat ketercapaian indikator pada rencana aksi DPMPTSP Tahun 2022, berikut disajikan data pencapaian rencana aksi tiap Triwulan selama Tahun 2022



TABEL 10

## CAPAIAN RENCANA AKSI ATAS PERJANJIAN KINERJADINAS PENANAMAN MODAL DAN PTSP KAB.BLL

No	Sasaran Strategis (Program)	Indikator Kinerja	Satuan	Kinerja						Anggaran (Rp)																				
				Target Kinerja Tahunan	Triwulan	Target	Realisasi	%	Keterangan	Program	Target Anggaran Tahunan	Triwulan	Target	Realisasi	%	Ket														
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17														
1	Meningkatnya Nilai Investasi	Nilai Realisasi Investasi	Rupiah	1.299.483.799.000	Triwulan I	324.870.000.000,00	179.674.951.672	55,31	Investasi PMDN sebesar Rp. 190.681.400.000 PMA sebesar Rp.95.012.785.003 Pada Triwulan III tahun 2022 realisasi investasi belum memenuhi target yang ditentukan karena secara periodik dilakukan pembinaan, pengawasan dan pemantauan kepada pelaku usaha PMDN namun pelaku usaha masih bingung untuk mendaftarkan usahanya pada system LKPM yg baru	Program Promosi Penanaman Modal	339.543.248	Triwulan I	91.179.063	33.395.422	36,63															
					Triwulan II	649.740.000.000,00	222.219.328.449	34,2				Triwulan II	182.358.126	86.947.720	47,68															
					Triwulan III	974.610.000.000,00	285.694.185.003	21,99				Triwulan III	273.537.189	225.528.298,00	82,45															
					Triwulan IV	1.299.483.799.000	-	0				Triwulan IV	339.543.248	-																
					Indeks Kepuasan Masyarakat	Nilai	81,5	-		-	0	-	-	0	-		-	-	-	-	-	-	-							
																								Triwulan I	-	-	0	Program Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	1.109.127.908	Triwulan I
		Triwulan II	81,5	82,02																				100,6	Triwulan II	552.485.273	286530320			51,86
		Triwulan III	81,5	82,02																				100,6	Triwulan III	831.000.000	508.353.598			61,17
		Triwulan IV	81,50																						Triwulan IV	1.109.127.908	-			
		Program Pelayanan Penanaman Modal	1.130.102.846	Triwulan I																				286.700.000	145.393.352	50,71				
				Triwulan II																				573.500.000	470959571	82,12				
				Triwulan III																				860.000.000	784.836.477	91,26				
				Triwulan IV	1.130.102.846	-	0																							
		Program Pengelolaan Data dan Sistem Informasi Penanaman Modal	155.141.037	Triwulan I	39.000.000	19.810.204	50,80																							
Triwulan II	78.000.000			59.430.612	76,19																									
Triwulan III	116.500.000			83.104.116	71,33																									
Triwulan IV	155.141.037			-	0																									
<b>TOTAL</b>										<b>2.771.811.786</b>		<b>2.733.915.039</b>	<b>1.601.822.489</b>	<b>58,59</b>																

**TABEL 11**  
**LAPORAN MONITORING DAN EVALUASI ATAS RENCANA AKSI PENCAPAIAN INDIKATOR KINERJA**  
**TRIWULAN III TAHUN 2022**

KODE PROGRAM, KEGIATAN & SUB KEGIATAN	NAMA PROGRAM, KEGIATAN & SUBKEGIATAN	INDIKATOR/TOLAK UKUR KINERJA	TARGET KINERJA		REALISASI KINERJA		SATUAN	CAPAIAN KINERJA (%)		RATA-RATA CAPAIAN KINERJA (%)
			ANGGARAN (Rp)	KOEFISIEN/ VOLUME	ANGGARAN (Rp)	KOEFISIEN/ VOLUME		ANGGARAN	OUTCOME /OUTPUT	
(1)	(2)	(3)	(4)		(5)		(6)	(7) = (5)/(4)*100		(8)
2.18.01	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Meningkatnya kualitas pelayanan publik dan akuntabilitas pelayanan publik	6.887.783.214,00	100,00	4.724.380.754,00	82,13	%	68,59	82,13	
2.18.01.2.01	1.1 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Prosentase peningkatan akuntabilitas kinerja SKPD	142.612.593,00	100,00	92.691.496,00	85,00	%	65,00	85,00	
2.18.01.2.01.01	1.1.1 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	- Jumlah dokumen anggaran - Jumlah dokumen perencanaan	85.896.142,00	2,00 5,00	56.732.232,00	2,00 4,00	Dokumen	66,05	90,00	
2.18.01.2.01.06	1.1.2 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi	30.964.561,00	3,00	21.544.264,00	2,25	Laporan	69,58	75,00	
2.18.01.2.01.07	1.1.3 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah dokumen SAKIP	25.751.890,00	10,00	14.415.000,00	9,00	Laporan	55,98	90,00	
2.18.01.2.02	1.2 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Prosentase kepuasan masyarakat dan aparatur terhadap pelayanan administrasi perkantoran dan pelayanan kantor	5.053.027.921,00	100,00	3.462.494.874,00	80,00	%	68,52	80,00	
2.18.01.2.02.01	1.2.1 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah dokumen pembayaran gaji dan tunjangan	4.869.099.000,00	2,00	3.340.694.001,00	1,50	Dokumen	68,61	75,00	
2.18.01.2.02.02	1.1.2 Penyediaan Admimistrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah dokumen kepegawaian	31.413.330,00	2,00	20.117.224,00	1,50	Dokumen	64,04	75,00	
2.18.01.2.02.03	1.2.3 Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/ Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah administrasi keuangan	151.431.541,00	3,00	100.954.379,00	2,25	Dokumen	66,67	75,00	
2.18.01.2.02.04	1.2.4 Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Jumlah laporan rekonsiliasi	-	12,00	-	9,00	Laporan	-	75,00	
2.18.01.2.02.05	1.2.5 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir tahun SKPD	Jumlah laporan keuangan akhir tahun	1.084.050,00	1,00	729.270,00	1,00	Laporan	67,27	100,00	

<b>2.18.01.2.06</b>	<b>1.3</b>	<b>Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>	<b>Prosentase kepuasan masyarakat dan aparatur terhadap pelayanan administrasi perkantoran dan pelayanan kantor</b>	<b>590.272.552,00</b>	<b>100,00</b>	<b>437.209.547,00</b>	<b>87,11</b>	<b>%</b>	<b>74,07</b>	<b>87,11</b>
2.1.18.01.2.06.01	1.3.1	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah komponen instalasi listrik	5.124.900,00	8,00	4.681.092,00	8,00	Jenis	91,34	100,00
2.1.18.01.2.06.02	1.3.2	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah peralatan dan perlengkapan kantor	375.222.599,00	30,00	328.068.499,00	27,00	Unit	87,43	90,00
2.18.01.2.06.04	1.3.3	Penyediaan Bahan Logistik kantor	Jumlah sarana/prasarana upacara	77.529.365,00	8,00	26.251.950,00	7,00	Jenis	33,86	87,50
2.18.01.2.06.05	1.3.4	Penyediaan Barang Cetak dan Pengadaan	Jumlah barang cetakan dan pengadaan	16.869.188,00	12,00	9.713.421,00	9,00	Jenis	57,58	75,00
2.18.01.2.06.06	1.3.5	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan perundang-undangan	Jumlah bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	9.360.000,00	36,00	6.318.000,00	28,00	Rekening	67,50	77,78
2.18.01.2.06.08	1.3.6	Fasilitas Kunjungan Tamu	Jumlah jenis makanan dan minuman	42.482.500,00	8,00	35.266.585,00	7,00	Jenis	83,01	87,50
2.18.01.2.06.09	1.3.7	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah rapat koordinasi dan konsultasi keluar daerah/dalam daerah	63.684.000,00	50,00	26.910.000,00	46,00	OH	42,26	92,00
<b>2.18.01.2.02</b>	<b>1.4</b>	<b>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan daerah</b>	<b>Prosentase kepuasan masyarakat dan aparatur terhadap pelayanan administrasi perkantoran dan pelayanan kantor</b>	<b>762.066.663,00</b>	<b>100,00</b>	<b>504.332.929,00</b>	<b>84,73</b>	<b>%</b>	<b>66,18</b>	<b>84,73</b>
2.18.01.2.08.01	1.4.1	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah surat terkirim	76.415.410,00	1.500,00	46.114.873,00	1.500,00	Exmplar	60,35	100,00
2.18.01.2.08.02	1.4.2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah rekening air, telepon, dan listrik	115.460.000,00	84,00	65.148.304,00	63,00	Rekening	56,42	75,00
2.18.01.2.08.03	1.4.3	Penyediaan Jasa Peralatan dan perlengkapan Kantor	Jumlah unit kendaraan	192.000.000,00	2,00	127.688.000,00	1,50	Unit	66,50	75,00
2.18.01.2.08.04	1.4.4	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	-Jumlah alat kebersihan	378.191.253,00	31,00	265.381.752,00	27,00	Jenis	70,17	88,92
			-Jumlah alat tulis kantor		54,00		49,00	Jenis		
<b>2.18.01.2.09</b>	<b>1,5</b>	<b>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>Prosentase kepuasan masyarakat dan aparatur terhadap pelayanan administrasi perkantoran dan pelayanan kantor</b>	<b>339.803.485,00</b>	<b>100,00</b>	<b>227.651.908,00</b>	<b>73,81</b>	<b>%</b>	<b>67,00</b>	<b>73,81</b>
2.18.01.2.09.02	1.5.1	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah kendaraan dinas/operasional layak pakai	317.836.485,00	21,00	220.647.475,00	19,00	Unit	69,42	90,48



2.18.05		Program Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal	Meningkatnya Investasi	1.104.970.545,00	1.169.535.419.100,00 1.299.483.799.000,00	508.353.598,00	75,00	Rp	46,01	75,00	
2.18.05.2.01	4.1	Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Nilai investasi dalam negeri yang sesuai ketentuan. Nilai investasi luar negeri yang sesuai ketentuan	1.104.970.545,00	1.169.535.419.100,00 129.948.379.900,00	508.353.598,00	75,00	Rp	46,01	75,00	
2.18.05.2.01.02	4.1.1	Koordinasi dan Sinkronisasi Pembinaan Pelaksanaan Penanaman Modal	jumlah dokumen pembinaan pelaksanaan penanaman modal	391.116.140,00	4,00	120.750.214,00	3,00	Dokumen	30,87	75,00	
2.18.05.2.01.03	4.1.2	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Penanaman Modal	jumlah dokumen pengawasan pelaksanaan penanaman modal	713.854.405,00	4,00	387.603.384,00	3,00	Dokumen	54,30	75,00	
2.18.06		Program Pengelolaan data dan	Meningkatkatnya Investasi	155.141.037,00	100,00	83.104.116,00	75,00	%	53,57	75,00	
2.18.06.2.01	5.1	Pengelolaan Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan yang Terintegrasi pada Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Prosentase pengaduan masyarakat yang ditindaklanjuti	155.141.037,00	100,00	83.104.116,00	75,00	%	53,57	75,00	
2.18.06.2.01.01	5.1.1	Pengolahan, Penyajian dan Pemanfaatan Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan perizinan berusaha Terintegrasi secara Elektronik	Jumlah media informasi perizinan dan non perizinan yang berbasis sistem pelayanan secara elektronik	155.141.037,00	1,00	83.104.116,00	0,75	media	53,57	75,00	
<b>JUMLAH TOTAL</b>				<b>9.659.595.000,00</b>	<b>100,00</b>	<b>6.326.203.243,00</b>	<b>78,30</b>		<b>65,49</b>	<b>78,30</b>	<b>71,90</b>

Singaraja, 30 September 2022

Kepala Dinas Penanaman Modal dan PTSP

Kabupaten Buleleng



**I Made Kuta, S.Sos**

Pembina (IV/a)

NIP. 19700710 199203 1 007





## BAB IV PENUTUP

Demikian Laporan Monitoring dan Evaluasi Pencapaian Aksi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Tahun Triwulan III Tahun 2022 ini di susun dengan harapan segala tugas yang telah di laksanakan pada bidang penanaman modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu ini dapat menjadi salah satu bagian penting dalam proses pembangunan Kabupaten Sukabumi yang lebih baik dalam rangka pencapaian visi terwujudnya Kabupaten Buleleng yang religius dan mandiri

Singaraja, 5 Oktober 2022

Kepala Dinas Penanaman Modal dan PTSP

Kabupaten Buleleng



**I Made Kuta, S.Sos**

Pembina (IV/a)

NIP. 19700710 199203 1 007



